

BAB I

PENDAHULUAN

Within the understanding of geopolitics based on Nusantara outlook, Indonesia necessarily increases the effort of mastering and developing technology to gain the added value of the national resources which is rooted on our nation's culture as an important instrument on creating qualified and high global competitive national productivity jump in achieving national prosperity and security and the whole human kind universally within the eternal peaceful world
(Lihat Ukur Wijaya Soelistijo.: 2013, pp. 200-211)

A. Latar Belakang

Kebijakan geopolitik maritim merupakan sebuah kebijakan yang potensial dan paling komprehensif bagi Indonesia untuk dikembangkan. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi negara bahwa wilayah maritim merupakan kekuatan nasional selain aspek wilayah daratan. Ratzel, yang menekankan pendekatan ruang hidup negara (*organism determinist, living space*) dimana negara diidentikan seperti manusia yang butuh ruang untuk hidup dan mengelola ruang tersebut sebagai bagian dari pertahanan hidup negara. Dengan posisi Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa menjadi *heartland* dengan orientasi pada geopolitik maritim.

Realitas ini menunjukkan bahwa ada relativitas hubungan antara negara dengan lingkungan tempat hidupnya atau wilayah geografinya. Mahzab Ratzel menganggap bahwa faktor alam atau geografi akan berpengaruh pada kebijakan negara atau *the state political power*. Mahzab Ratzel (1844-1904) menganggap pengaruh letak geografi (bentuk, luas, sumberdaya alam, sumberdaya manusai, letak) merupakan indikator tumbuh dan berkembangnya suatu negara (*organisme hidup*). Ratzel meramalkan bahwa konstalasi politik dunia akan didominasi antara negara maritim dan kontinental dalam menguasai dunia bahkan menyebutkan bahwa Samudra Pasifik adalah kehidupan masa depan negara.¹

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi dengan munculnya kebijakan poros maritim yang menunjukkan kecerdasan khasan orientasi model kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi. Dengan bertumpu pada akses berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik membawa Jokowi ingin mengembalikan Indonesia kepada identitas semula yakni sebagai negara kepulauan dengan basis

¹ Sri Hayati dan Ahmad Yani., 2007, *Geografi Politik*, PT. Rafika Aditama: Bandung, h.10-12.

budaya maritim wawasan nusantara disertai dengan segala kepemilikan potensi maritim terhadap 17.000 pulau lebih yang dimiliki Indonesia.

Pada debat Capres dan Cawapres tahun 2014 kebijakan politik luar negeri Jokowi di arahkan pada unsur (1) Membangun identitas budaya maritim dengan mengedepankan praktek diplomasi dan kerjasama antar negara, (2) meningkatkan peran global berbasis pada diplomasi *middle power*, (3) memperluas keterlibatan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik,(4) mempertajam diplomasi publik (*G to G, G to B, G to C. P to P*).² Dari beberapa pilar tersebut bahwa konsep kebijakan luar negeri Jokowi cenderung masih bersifat *million friends zero enemy* dengan tidak meninggalkan secara mutlak konsep SBY, yang masih menjadikan kerjasama melalui peran diplomasi untuk memperluas jangkauan kerjasama sehingga menginginkan peran Indonesia dalam dunia internasional.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia di era Jokowi terlihat jelas dari lembar visi dan misi pada halaman bahwa orientasi kebijakan politik luar negeri Jokowi pada geopolitik maritim. Konsep ini mengadopsi teori geopolitik Alfred Thayer Mahan sebagai pelopor orientasi maritim yang membuktikan bahwa kekuatan laut merupakan instrumen negara untuk menguasai dunia dalam paradigma geopolitik maritim. Terbukti dengan pengelolaan laut yang baik oleh Amerika Serikat sebagai orientasi kekuatan sumber ekonomi dan pertahanan negara dimasa itu.

Keseriusan Jokowi untuk mengkapitalisasi potensi maritim nasional didukung oleh terbentuknya Badan Keamanan Laut melalui Instruksi Presiden no 178 tahun 2014 serta terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI sesuai Inpres nomor 10 tahun 2015. Terbentuknya dua intansi tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang membawahi empat kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan sebagai tugas pokoknya. Sehingga, menjadi bertanda besar kepemimpinan Jokowi begitu peduli dengan isu maritim. Jokowi ingin melihat kembali wilayah maritim sebagai sumber kekuatan dan pendapatan nasional yang perlu di internasionalisasi.

Dalam konteks inilah Jokowi membawa Indonesia dalam paradigma *global exis maritime* dimana menginternasionalisasi isu domestik menjadi *marketing power* dalam politik internasional. Terlihat dalam pidato kenegaraannya dalam beberapa

²Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia., 2014, Visi –misi Jokowi –JK, KPU :Jakarta.

KTT seperti di Beijing dan KTT Asia Afrika di Jakarta. Dalam lima pilar kebijakan geopolitik maritim terkait mengembangkan kembali budaya maritim, membangun infrastruktur maritim, mengkapitalisasi sumberdaya maritim, diplomasi maritim serta pertahanan maritim adalah bukti nyata Jokowi membawa Indonesia pada arah politik spasial maritim.

B. Rumusan Masalah

Dari sejumlah alasan dan deskriptif di atas penulis merumuskan masalah penelitian yakni:

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim Jokowi?

C. Tujuan

Adapun yang akan menjadi tujuan riset ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim Jokowi.

D. Kontribusi Riset

1. Kontribusi Akademis

Riset ini diharapkan bisa menjadi sumbangsi akademis bagi mahasiswa, dosen, peneliti terait dengan isu kemaritiman. Sehingga riset ini akan menjadi salah satu rujukan dalam penelitian terkait hubungan korelasi antara kebijakan maritim dan keamanan. Dengan demikian secara rinci bahwa riset ini berkontribusi menjelaskan potensi yang dimiliki Indonesia yang secara komprehensif akan dijelaskan pada bab II dan pada bab III akan di paparkan sejumlah potensi ancaman keamanan potensi geopolitik maritim Indonesia seelama ini yang menjadikan Indonesia belum sepenuhnya memiliki keamanan maritim yang kuat terhadap adanya ancaman-ancaman tersebut. Di bab IV akan di analisis menggunakan teori geopolitik yang dikombinasikan dengan teori /model pengambilan kebijakan luar negeri terkait masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dikeluarkannya kebijakan doktrin poros maritim untuk menciptakan ketahanan maritim Indonesia. Sehingga, kontribusi besarnya adalah riset ini menjadi rujukan agar semua *stakeholders* untuk melihat potensi tersebut pada bab II sebagai kekuatan nasional, sejalan dengan melakukan kolaborasi terhadap munculnya ancaman-ancaman terhadap potensi maritim Indonesia. Hal tersebut bisa dipahami dengan proses analisis pada bab IV sebagai solusi dari

korelasi antara adanya potensi maritim yang terancam dan keinginan menciptakan keamanan maritim.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi sejumlah negara baik dari Indonesia, maupun dalam lingkup sub negara tersebut berupa lembaga negara yang berwenang memanfaatkan wilayah maritim. Atau dalam lingkup paling kecil adalah bisa dimanfaatkan juga oleh para Pemerintah Daerah jika daerahnya memiliki basis ekonomi maritim untuk membangun ekonomi nasional. Artinya secara praktis kontribusi pada Bab II bisa digunakan untuk melihat potensi tersebut bagi negara atau daerah yang harus di kembangkan. Akan tetapi peran aktif pemerintah dalam merumuskan implementasi kebijakan harus melihat kontribusi pada Bab III yakni ancaman-ancaman potensi maritim apabila ingin menciptakan keamanan maritim yang telah di proses analisa pada bab IV.

E. Originalitas Riset

Penelitian ini merupakan riset murni penulis yang mengembangkan sejumlah penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terfokus pada prespektif Indonesia melihat “dirinya” sebagai negara maritim. Fokus kajian yang ada hanya bersifat unilateralisme. Maksudnya penelitian yang ada hanyalah melihat kajian geopolitik Indonesia dalam bidang maritim sebagai sebuah kekuatan baru. Penelitian ini melihat berbeda yang dengan multilateralisme eksternal, maksudnya penulis akan mengaitkan tujuan poros maritim Indonesia dengan dalam sudut pandang geopolitik maritim untuk mencapai visi tersebut. Penelitian ini penelitian terbaru, adapun apabila dalam berbagai literatur yang penulis belum sempat mendapatkan atau membacanya terkait dengan penelitian yang sama, maka penelitian ini adalah pelengkap dan pengembangan dari penelitian-penelitian yang ada.

F. Studi Pustaka (Review Literatur)

Dalam penelitian sebelumnya misalnya yang dilakukan oleh Simela Victor Muhamad (2014) dalam judul “Indonesia dalam Kemananan Maritim Kawasan”. Dalam tesis ini yang dimaksudkan kawasan adalah ASEAN dan Asia Pasifik. Tesis ini bercerita tentang permasalahan yang ada di kawasan terkait maritim adalah seputar sengketa batas maritim kawasan. Kondisi ini melibatkan negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik termasuk China dan Jepang. Negara-negara

maritim seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Laos, Filipina yang juga berbatasan maritim menimbulkan konflik perbatasan di antar negara. Belum lagi keterlibatan China dan Jepang dalam konflik Laut China Timur dan Laut China Selatan.³

Berkaitan dengan konflik maritim dalam penelitian oleh Poltak Partogi Nainggolan (2014) “Keamanan Maritim Di Asia Pasifik dan Respon Indonesia dan ASEAN”. Dalam tesis ini bercerita tentang eskalasi konflik di dua kawasan laut China timur dan Laut China Selatan, Dalam eskalasi tersebut bahkan China bahkan menerapkan *Air Defence Identification Zone* yakni pertahanan udara untuk menjadi kedua laut teritorialnya. Kondisi ini tentunya mengingat sumberdaya maritim dua laut tersebut sangat potensial. Bahkan 2013 anggaran militer China mencapai 1.720 triliun artinya hampir sama dengan APBN Indonesia. Masalah lainnya adalah munculnya masalah perompakan dan pembajakan terhadap kapal-kapal dari produsen dan konsumen yang melintasi laut ASEAN terutama kapal-kapal yang berlayar dari Teluk Persia, Teluk Aden dan Samudra Hindia. Misalnya pada tanggal 22 april 2014 kapal tengker Singapura di bajak di Selat Malaka yang akan menuju Myanmar. Selain itu 14 Juni 2014 kapal tangker Al Maru yang terdaftar di Honduras juga di bajak di laut China Selatan. Masalah lainnya adalah kasus terorisme maritim. Tentunya kondisi ini harus diwaspadai sebab para teroris akan cenderung mudah untuk membajak kapal – kapal yang melintas untuk mengambil hasil dari pembajakan tersebut tentunya orintasi ekonomi.

Melanjutkan tesis ini dalam tesis Laode Muhamad Fathun (2015) “*Gun Trafficking and ASEAN Stability*“, dalam tesis ini bercerita tentang suplai senjata terhadap kelompok-kelompok terorisme dan gerakan separatisme cenderung di selundupkan melalui laut. Kelompok GAM, Kelompok separatis Moro, Macan Tamil adalah sejumlah gerakan -gerakan yang senjatanya di suplai lewat laut. Misalnya Sejak pecahnya konflik di Poso, banyak fakta tentang penggunaan berbagai jenis senjata api ilegal. Di antaranya, termasuk kategori *bolt action rifle*, seperti SMLE No.5 *jungle carbine* (Inggris), yang lazim dikenal dengan LE (*Lee-Enfield*) atau *jungle*. Adapula jenis senapan serbu, seperti M16 buatan *Colt* (USA) dan AK-47 (*Avtomat Kalashnikova*) buatan Rusia. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendasari kebijakan geopolitik poros maritim Jokowi baik

³ Muhamad , Simela Victor, 2014, *Indonesia Dalam Kemananan Maritim Kawasan*,(Poltak Partogi Nainggolan/ed)), P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika: Yogyakarta.

karena faktor ideologis maupun struktur geopolitik terkait ancaman keamanan geopolitik maritim Indonesia

G. Kerangka Teoritik

1. Definisi Operasional

a. Kebijakan Politik Luar Negeri

Dalam studi kebijakan politik luar negeri ada banyak teori dan asumsi yang coba menjelaskan fenomena ini. Berangkat dari asumsi bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah negara bukan hanya bisa dilihat dari kebutuhan politik domestik yang di tujukan kepada negara lain, dan atau respon terhadap negara lain dalam sebuah sistem internasional. Pendekatan yang ada sistemik dan analitik yang bertumpu pada kebutuhan internal dan eksternal. Namun yang perlu dipahami adalah kebijakan luar negeri merupakan sebuah peristiwa yang *central mystery* yang akan susah ditebak objeknya secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada akan susah menemukan informasi yang 100% murni tentang proses perumusan kebijakan politik luar negeri sebuah negara. Objeknya memang ada tetapi sifatnya kabur.⁴

Banyu Perwita dan Muhamad Yani menjelaskan pula kebijakan politik luar negeri sebuah negara adalah *action theory* yang menyangkut sikap, prilaku, nilai, ideologi yang dimiliki sebuah negara untuk diperjuangkan.⁵ Kemudian T. May Rudi melanjutkan bahwa sisi variabel dari kebijakan politik luar negeri bertumpu pada keputusan-keputusan (*decision*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*), yang di asumsikan untuk pemilihan tujuan tertentu, pemilihan sarana dan cara implementasi.⁶ Kemudian disimpulkan oleh Holsti bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah negara terdiri ada empat komponen yakni : (1) orientasi kebijakan politik luar negeri, peran nasional, (3) tujuan dan (4) tindakan.⁷

⁴ Tulus, Warsito, 1998. *Teori- Teori Politik Politik Luar Negeri*, Keterbatasan dan Relevansinya, BIGRAF Publishing: Yogyakarta.

⁵ Anak Agung, Banyu Perwita, dan Yan Yan, Muhamad Yani, , 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya: Bndung, halm.47.

⁶ T. May, Rudy, 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*, PT.Rafika Aditama: Bandung, hlm.89.

⁷ K.J. Holsti, 1988, *Politik Internasional Untuk Kerangka Analisis*, PT.Erlangga: Jakarta.

Setelah menganalisa seluruh pendapat ahli di atas pada dasarnya memiliki kemiripan namun, penulis akan menyimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan luar negeri sebuah negara merupakan reformulasi sikap, nilai, tujuan, ideologi yang terkonsep dalam sebuah bentuk kepentingan nasional semua negara dengan melihat kebutuhan politik nasional (politik domestik) yang akan di bawa dalam arena politik internasional. Jadi pada dasarnya kebijakan luar negeri tidak bisa di pisahkan antara kebutuhan domestik dan eksternal negara. Semua menyatu secara komprehensif ketika kebijakan itu dikeluarkan. Karena, antar kebutuhan internal dan eksternal yang bisa berubah setiap waktu atau kondisional mengharuskan negara untuk beradaptasi untuk memilih setiap tindakan yang akan dilakukan dalam proses kebijakan luar negerinya. Proses perumusan dan penetapan kebijakan luar negeri merupakan usaha negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang tentunya melihat pula bentuk geopolitik negara ,sebab geopolitik merupakan salah satu landasan fisik negara untuk mengambil kebijakannya seperti halnya yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara yang berbasis maritim.

Sejalan dengan itu, Kusumaatmadja berpendapat, sudah seharusnya bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di arahkan sesuai dengan nilai-nilai dasar pancasila yang dimana kepentingannya harus mencakup pada: (1) kepentingan pembangunan secara menyeluruh pada pembangunan ekonomi yang terarah, (2) keamanan dan kestabilan dalam negeri, (3) serta menjaga secara mutlak wilayah geografis Indonesia.⁸ Dengan demikian arahnya lebih jelas serta implementasinya. Sebab semakin jelas orientasi kebijakan suatu negara maka negara tersebut akan mampu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan dasar atas kepentingan nasional yang akan di capainya.

b. Keamanan

Keamanan dapat diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala ancaman. Artinya keamanan menyangkut perpaduan antara ancaman dan kerawanan. Keduanya menyangkut keamanan baik domestik maupun internasional. Sehingga , setiap negara harus memfokuskan kebijakan luar negerinya pada usaha mengamankan kondisi nasional sekaligus juga

⁸ Mochtar Kusumaadja, 1983, *Politik Luar Negeri Indonesia Dan Pelaksanaannya Di Dewasa Ini*, Alumni IKAPI:Bandung, hlm.7.

menghindari ancaman dari luar. Sedangkan kerawanan mengakut tentang merupakan kondisi negara yang tidak bisa melerai segala ancaman-ancaman yang datang di akibatkan oleh *weak power* negara tersebut.⁹ Keamanan secara etimologis berasal dari kata “*secures*”. *Secures* merupakan gabungan dari kata “*se*” yang berarti tanpa dan “*curus*” yang berarti bebas dari bahaya dan ketakutan. Menurut Barry Buzan, keamanan yaitu:

Security is primarily about the fate of human collectivities..about the pursusit of freedom from threat. The bottom lines is about survival, but it also includes a substantial range of concerns about the condition of existence..Security is affected by faktors in five major sectors: military, political, economis, societal, and environmental.(Keamanan utamanya adalah tentang manusia keseluruhan..tentang mengejar kebebasan dari ancaman. Bentuk dasarnya adalah tentang bertahan, tapi keamanan juga memasukkan memasukkan batasan substansi dari focus masalah tentang kondisi eksistensi..keamanan dipengaruhi oleh lima hal penting: militer, politik, ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan hidup).¹⁰

Konsep keamanan, menurut Barry Buzan, pada intinya tentang ketahanan hidup. Ketahanan (*ressilience*) menyangkut keterpaduan segala aspek kehidupan negara secara utuh dan menyeluruh. Ketahanan adalah aspek tolak ukur kesejateraan negara dalam menciptakan negara yang kukuh dan utuh. Ketahanan menyangkut ideologi, ekonomi, politik, sosial ,budaya dan keamanan.¹¹ Oleh sebab itu, usaha untuk bertahan hidup ini dicapai dengan berusaha mengejar kebebasan manusia yang bebas dari ancaman dan bahaya. Dalam lingkup yang lebih luas, manusia tersebut berada dalam sebuah negara. Karena itu, keamanan juga menyangkut eksistensi negara sebagai wadah perlindungan manusia. Eksistensi ini dicapai dengan berusaha mengurangi maupun menghilangkan ancaman. Ancaman maupun gangguan yang menimbulkan bahaya dan ketakutan dapat berasal dari dalam maupun luar negara. Karena itu, keamanan dapat berupa keamanan internasional dan keamanan nasional.

Makna keamanan (*security*) bukan sekedar kondisi ”aman tenteram” tetapi menuntut adanya kemampuan untuk mempertahankan negaranya dari serangan atau pendudukan atas wilayah daratan, laut teritorial dan wilayah

⁹ T. May ,Rudy T, 2002, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.*, PT.Rafika Aditama: Bandung, h.31.

¹⁰ Anak Agung, op.cit, h. 27. , Suprianto Op.cit, h.40.

¹¹ May Rudi, op.cit, h. 113.

udara. Keamanan mengacu pada arti filosofis bahwa keamanan merupakan perlindungan terhadap suatu nilai yang merujuk pada objek fisik tertentu. Lebih dari itu keamanan merupakan arti yang luas lebih dari sekedar hubungan fisik komoditas. Keamanan merujuk pada kata “bebas dari” atau bebas untuk”.

Keamanan internasional yang dimaksud disini dikaitkan dengan fenomena “*interstate conflict*”. Sebab, dalam pandangan tradisional bahwa dunia internasional adalah hasil dari interaksi antar negara-negara maka keamanan internasional dipengaruhi oleh interaksi antar negara tersebut termasuk konflik antar negara. Di sisi lain, dengan semakin majunya jaman dan interaksi antar negara maka batas antara yang internasional dan nasional tidak jelas sehingga hal tersebut juga mempengaruhi konsep keamanan nasional.

The confidence held by the great majority of the nation's people that the nation has the military capability and effective policy to prevent its adversaries from effectively using force in preventing the nation's pursuit of its national interest(Kepercayaan yang dipegang oleh kaum mayoritas dari negara bangsa dimana negara memiliki kemampuan militer dan kebijakan yang efektif untuk mencegah musuhnya menggunakan kekuatannya untuk mencegah negara tersebut mengejar kepentingan nasionalnya).¹²

Sedangkan definisi konsep keamanan maritim merupakan dua gabungan pemikiran yaitu kerangka tradisional tentang keamanan yang cenderung membatasi konsep keamanan (*de-securitization*) dengan kecenderungan kompetisi atau masalah keamanan antar negara. Sedangkan kelompok non-tradisional yang memiliki kecenderungan untuk memperluas konsep keamanan (*securitization*). Bentangan keamanan (*security landscape*) menurut mazhab non-tradisional tersebut harus memasukan masalah keamanan intranegara dan masalah keamanan lintas nasional. Kondisi masalah keamanan intra-negara misalnya munculnya kekacauan (*disorder*) dalam negara dan masyarakat karena etnik, ras, agama, linguistik atau strata ekonomi. Sedangkan masalah keamanan lintas nasional misalnya ancaman keamanan yang berasal dari isu kependudukan seperti migrasi, lingkungan hidup dan sumber daya yang ruangnya tidak dibatasi pada skala

¹² Aleksius Jemadu, 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.27.

nasional. Ancaman keamanan ini juga terkait dengan konsep keamanan manusia (*human security*).¹³ Sehingga apapun objeknya bahwa keamanan nasional merupakan kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

2. Teori dan Model

a. Teori Geopolitik

Pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang telah lama disadari signifikansinya sejak zaman dahulu. Perspektif manusia melihat bagaimana keadaan alam atau lingkungan dalam hubungannya dengan perilaku politik manusia senantiasa mengalami perkembangan dan evolusi sejak pada pertama kalinya hal ini disadari. Geopolitik memelajari bagaimana keputusan politik dapat diambil secara tepat dan strategis dengan mempertimbangkan faktor geografis. Geografis dalam hal ini mengacu pada batas-batas geografis antar negara yang juga berarti batas politis. Geopolitik merupakan daerah irisan antara *political science* dengan *political geography* sehingga geopolitik atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut *human geography* yang prinsipnya menyangkut hubungan antara *political behavior* dan *psycal features*. Artinya erat hubungan antara perilaku politik negara dan lingkungan geografinya.¹⁴

Dari segi bahasa dalam penulisan “geopolitik” menggunakan huruf “k” bukan “c”. Dalam bahasa Inggris menggunakan “cs” dibelakang kata *geopolitics*. Dalam konteks ini merupakan bagian dari geostrategi Jerman yang merupakan perkembangan pemikiran dari Otto Von Bismark yang maksudnya “ *a Nazi doctrine holding that the geographic , economic , and political needs of Germany justified its invasion and seizure of other land*” yang intinya adalah sebuah doktrin bagi Jerman untuk menginvasi wilayah-wilayah negara lain. Teori ini dikembangkan oleh Frederich Ratzel “(1844-1904) yang merupakan seorang *geographer* Jerman yang menyamakan negara dengan makhluk biologis seperti konsep *darwinisme* sosial yakni makhluk itu akan hidup, berkembang dan akhirnya mati.¹⁵

¹³ Makmur, Keliat, 2009, *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 13, No.1 Juli 2009, h.113.

¹⁴ Sri Hayati dan Ahmad Yani, op.cit.h.8.

¹⁵ Suprianto op.cit.356-357.

Dalam literatur lainya oleh Gearóid Ó Tuathail menyebutkan bahwa “Kjellen *and other imperialist thinkers understood geopolitics as that part of Western imperial knowledge that dealt with the relationship between the physical earth and politics. Goepolitics notorious Nazi foreign policy goal of Lebensraum (the pursuit of more “living space” for the German nation.*¹⁶

Di buku ini mengatakan bahwa Kjelen merupakan penemu pertama kata geopolitik itu. Teori geopolitik menjadi dasar kebijakan luar negeri Nazi saat itu. Jadi letak dan kondisi geografi memainkan peran penting dalam hubungan internasional, dengan letak dan kondisi geografi telah menentukan bentuk suatu negara dalam artian identitas mereka, karakter, dan sejarah negara bangsa, bahkan sampai kepada politik luar negeri suatu negara. Geografi suatu negara bisa saja membantu dalam hal kehidupan sosial, politik, ekonomi karena letak dan kondisi geografi adalah salah satu kunci dalam membangun dan mengembangkan kehidupan perekonomian suatu negara.

Griffith menyatakan bahwa: *Geopolitics is the study of the influence of geographical factors on state behaviour – how location, climate, natural resources, population, and physical terrain determine a state’s foreign policy options and its position in the hierarchy of states*¹⁷

Geopolitik adalah sebuah studi geografi yang dikaitkan dengan kondisi kebijakan luar negeri sebuah negara dan fenomena politik dengan asumsi bahwa kekuatan sebuah negara bergantung pada wilayahnya, sungai jalanan, bahan mentah dan makanan dan termasuk penduduknya, pemerintahnya, ekonominya dan budayanya. Secara abstrak, geopolitik tradisional menunjukkan hubungan dan pernyataan kausalitas antara kekuatan politik dan ruang geografis. Terminologi ini sering dianggap sebagai formulasi khusus yang berhubungan dengan kepentingan strategis relatif dari pentingnya potensi geografis dalam perspektif dunia internasional. Fokus utama teori geopolitik berhubungan dengan korelasi antara kekuatan dalam bidang politik, identifikasi wilayah inti dari perspektif internasional, dan hubungan antara kapabilitas laut dan darat yang dimiliki.

¹⁶ Tua Gearoid thail , O, Dkk, 1998, *The Geopolitics Raeder: Routledge* 11 New Fetter Lane, London, hlm.1.

¹⁷Martin, Griffiths dan Terry O’Callghan, 2002, *International Relations :the key concepts*, Routledge: New York, hlm.120.

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani “geo” yang artinya bumi dan *politics* menyangkut kekuasaan. Dalam arti luas bahwa geopolitik merupakan sebuah teori yang berada dalam lingkup hubungan internasional yang menjelaskan hubungan antara politik dan teritorial. Yang merupakan seni dan praktek menganalisis, memberikan penjelasan, dan memperkirakan (dengan menggunakan kekuatan politik terhadap teritorial. Khususnya dalam menganalisis kebijakan luar negeri untuk mendapatkan penjelasan, pemahaman dan prediksi terhadap tingkah laku hubungan internasional dalam sudut pandang geografi.¹⁸Sejalan dengan itu ,

Gearóid Ó Tuathail menyatakan geopolitics has enjoyed a revival of interest across the world as foreign policy makers, strategic analysts, transnational managers and academics have struggled to make sense of the dynamics of the world political map. Many decision makers and analysts come to geopolitics in search of crystal ball visions of the future, visions that get beyond the beclouded confusion of the immediate to offer glimpses of a future where faultlines of conflict and cooperation are clear. Geopolitics addresses the “big picture” and offers a way of relating local and regional dynamics to the global system as a whole. It nevertheless promotes a spatial way of thinking that arranges different actors, elements and locations simultaneously on a global chessboard.¹⁹

Aplikasi teori ini disimpulkan bahwa geopolitik merupakan sebuah teori dalam hubungan internasional. Teori ini digunakan untuk melihat kebutuhan negara dalam konteks geografi. Atau interaksi antar geografi dan politik. Geopolitik bisa digunakan negara untuk menganalisis kebutuhan kebijakan luar negerinya baik dalam konteks melakukan kerjasama ataupun konfliktual. Geopolitik merupakan peta bagi negara untuk bermain dalam politik internasional baik dalam skala lokal, regional maupun global. Dengan teori geopolitik negara bisa memiliki visi kedepan tentang sesuatu aktivitas yang menyangkut dengan kepentingan nasional. Teori ini akan digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana kemampuan kapabilitas sumberdaya maritim yang dimiliki Indonesia terkait keinginannya menjadi negara poros maritim. Teori ini akan membedah konsep *power* secara komprehensif untuk melihat

¹⁸ Suprianto op.cit. h.359.

¹⁹ Gearóid Ó, Tuathail , and Simon Dalby, 1998b, *Rethinking Geopolitics*, Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada .

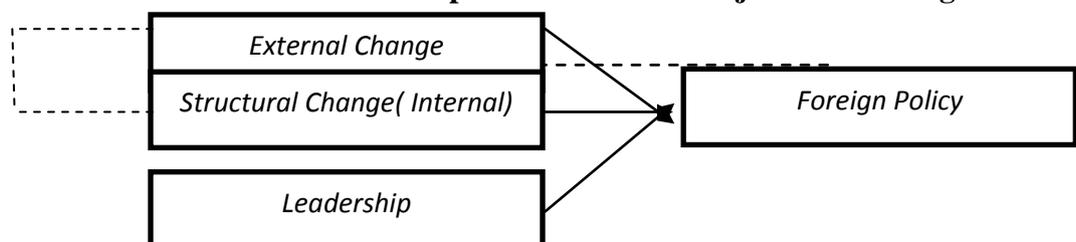
bagaimana pengaruh geopolitik tersebut terhadap masalah-masalah maritim yang di alami Indonesia.

b. Model Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri

Hudson seorang peneliti kebijakan politik luar negeri menurutnya jika seorang peneliti ingin menganalisa kebijakan politik luar negeri bagian dari sub disiplin ilmu hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri dan perilaku perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara yang diperankan individu atau kelompok dengan landasan teoritis pengambil kebijakan dengan komitmen untuk membangun teori aktor-aktor khusus (*actor specific theory*) ini sebagai media antara teori umum tentang aktor (*actor general theory*) dengan kompleksitas dunia yang dibagi dalam tingka tingkat analisis untuk melihat *spectrum* komponen dari pembuatan keputusan menjadi *output*.²⁰

Untuk itu dalam analisis kebijakan luar negeri dalam penulisan tesis ini dalam kasus menganalisa tujuan Indonesia menjadi negara yang berbasis poros maritim maka dan mesti menyelesaikan permasalahan keamanan maritimnya, penulis memilih pendekatan yang di keluarkan oleh Rosenau dengan pendekatan *adaptive foreign policy*. Model pendekatan ini melihat bagaimana pengaruh kondisi internal dan eksternal sebuah negara dalam implementasi kebijakan laur negerinya. Dalam melihat kondisi eksternal dan internal tersebut tidak lepas dari interpretasi ideologis terhadap struktur wilayah negara. Terkhusus karya ini melihat bagaimana proses perumusan kebijakan poros maritim Jokowi yang di adopsi dari teori geopolitik Alfred Mahan yang sangat militeristik dan unilateral.

Skema 1. Model Adaptif Perumusan Kebijakan Luar Negeri



Sumber: James Rosenau.,1974 Comparing Foreign Policy:Theories , Findings and Methods, Sage Publication: New York.h.47.

²⁰ Hudson, V.M., 2008, The History and Evolutions of Foreign Policy Analysis. N. Smith, A. Hadfield and T. Dunne (eds) Foreign Policy theories, actors, cases. Oxford University Press, Oxford.

Aplikasi model kebijakan luar negeri menurut Rosenau ini , memungkinkan setiap aktor melalui *decision maker (Leadership)* yang dimaksudkan adalah Jokowi yang harus menyadari kebutuhan dalam negerinya atau politik domestik atau kondisi internal negara. Selain itu, tentunya berjalan seiring dengan kebutuhan eksternal negara terkait kebutuhan domestiknya. Sehingga, antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam politik internasional yang berada dalam sebuah sistem internasional. Sistem yang internasional yang dimaksudkan adalah hubungan eksternal tentunya dalam konteks Indonesia ditempuh melalui diplomasi.

Menurut Rosenau proses perumusan kebijakan luar negeri negara oleh aktor *decision maker* sang pelaku harus mengetahui dengan benar persepsi politik domestik dan estimasi atau proses adaptasi terhadap objek yang akan di capai. Persepsi tersebut adalah bagaimana interpretasi terhadap isu dari pengalaman- pengalaman negara tersebut baik didapatkan dari tim penasehat, akademisi, analis dll. Hal ini berguna untuk melihat kapabilitas kemampuan dalam kepemilikan *power* sebagai estimasi dan kalkulasi terkait kemampuan yang menyangkut yang nyata misalnya militer, jumlah penduduk, ekonomi dalam bentuk kebutuhan bisa mempengaruhi kebijakan negara. Selain itu, *power* tidak nyata seperti karakter nasional, nilai moralitas, norma, hukum nasional bisa juga mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.

Model adaptasi ini akan di gunakan oleh penulis berangkat dari analisis penulis bahwa Jokowi sebagai pemimpin yang baru terpilih yang minim akan pengalaman membutuhkan adaptasi terhadap kondisi internasi Indonesia dalam hal ini adalah keadaan politik domestik, menyangkut kebijakan struktural semasa SBY. Model ini akan melihat bagaimana proses perumusan kebijakan luar negeri Jokowi dalam orientasi maritim terutama aktor- aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan minimnya pengalaman Jokowi yang baru terpilih cenderung proses perumusan kebijakan geopolitik maritim merupakan pengaruh kondisi struktural atau kondisi internal. Sehingga Jokowi hanya sebagai *leader* yang hanya menerima jadi dalam proses perumusan tersebut. Dalam konteks ini Jokowi sebagai *leader* hanya berbekal pada pengaruh *marketing* politiknya terkait

dengan karakter kepemimpinannya yang demokratis dan sosiologis, sederhana, dan tidak statis. Akibatnya, dengan modal tanpa pengalaman dalam urusan luar negeri atau hubungan eksternal maka Jokowi harus beradaptasi dengan sejumlah masukan-masukan politis terkait dengan kebutuhan internal dan eksternal Indonesia terutama terkait dengan geopolitik maritim Indonesia yang selama ini tidak dikelola dengan baik. Maka munculah rumus ²¹ $Pt = Lt + Et + St$. Pt =Kebijakan Politik Luar Negeri, Lt = Kepemimpinan, Et =Perubahan Eksternal, St =Perubahan struktural Internal.

Rumus Rosenau ini merupakan penyederhanaan dalam karakter kekuatan nasional yang dimiliki oleh negara dalam politik internasional yang dicetuskan oleh sejumlah ahli politik seperti Morgenthau yang membaginya dalam 8 unsur kekuatan nasional negara. Adapun keempat pola adaptasi itu, adalah: a) *preservative adaptation* (sikap responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal); b) *acquiescent adaptation* (bersikap peduli pada perubahan internal dan eksternal); c) *intransigent adaptation* (sikap responsif terhadap lingkungan internal); dan d) *promotive adaptation* (bersikap acuh terhadap lingkungan internal dan eksternal).²²

H. Hipotesa

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sementara : A. faktor interpretasi ideologis, B. faktor struktur geopolitik terkait ancaman keamanan maritim tradisional dan non tradisional.

I. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Usman dan Purnomo Setiady Akbar, metode deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya memberikan penggambaran fakta secara faktual sistematis berkenaan dengan sifat populasi atau objek yang diteliti.²³ Dengan demikian, penulis akan mengamati fakta kondisi geopolitik maritim yang menitik beratkan pada pemanfaatan struktur kewilayahan dalam perumusan kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Dalam tipe penelitian ini, harus di ketahui terlebih dahulu

²¹ Anak Agung, op.cit, h.66

²² Ibid

²³ Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara.h.42.

variabel yang ingin di analisa berarti seorang peneliti harus menentukan dua poin utama yakni penentuan variabel independen dan perilaku yang hendak di amati.

Ada tiga alasan mengapa sebuah fenomena harus dijelaskan: (1) pemisahan antara fakta yang benar atau tidak (pengujian), (2) Seorang peneliti tidak mungkin bisa meneliti semua fenomena yang terjadi sehingga seorang peneliti harus mengambil fenomena yang ingin di telitinya saja, hal ini di takutkan pada dasar asumsi atau interpretasi jika fenomenanya terlalu banyak, (3) Seorang peneliti tidak bisa melepaskan diri dari nilai moralitas dan etika. Karena dengan dasar penjelasan yang kuat akan menghasilkan teori yang berdasar pada nilai analisis dan sintesis. Analisis di artikan upaya seorang peneliti memisahkan, mengurai, fakta – fakta sedangkan sintesis adalah mengelompokkan mengklasifikasikan agar variabel yang diteliti lebih masuk akal.²⁴ Dalam riset ini menekankan pada analisa level negara (*middle range theory*). Dalam tingkat analisa menurut Mas'ood terbagi atas 5 tingkat analisa yakni perilaku individu, perilaku kelompok, tingkat negara bangsa dan sistem internasional. Dengan menempatkan kebijakan geopolitik poros maritim sebagai variabel independen dan Indonesia terkhusus di era Jokowi sebagai variabel dependen. Sehingga, dari dua variabel tersebut ada korelasi keduanya dimana struktur geopolitik maritim Indonesia akan mempengaruhi tindakan Jokowi sebagai aktor pengambil kebijakan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan menggunakan tipe observasi lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah aktor yang berkaitan dengan penelitian ini: Adapun sejumlah tempat yang akan di kunjungi adalah :

- a. Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI di Jakarta:
 - 1) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementrian
 - 2) Deputi Bidang Koordinasi Insfrastruktur Kemaritiman
 - 3) Deputi Bidang Koordinasi Sumbedaya Manusia, IPTEK dan Budaya Maritim Kemaritiman
 - 4) Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

²⁴ Scoot, Andrew, Linklater, 1996, *Theories Of International Relation* Trjmh, Nusamedia, :Bandung. Burchill, hlm.17-18.

- b. Badan Keamanan Laut RI di Jakarta:
 - 1) Deputi Bidang Operasi dan Latihan
 - 2) Deputi Biro Info, Hukum dan Kerjasama
 - 3) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi KAMLA
- c. Perpustakaan Nasional RI di Jakarta

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber data untuk menyempurnakan analisis yakni sumber data primer dan data sekunder. Data Sekunder akan lebih menitik beratkan pada telaah pustaka atau *library research* yang akan di peroleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, *website* dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data primer akan dilakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada aktor-aktor yang relevan dengan penelitian ini yang sudah dituliskan di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Robert K Yin dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan sebuah penelitian setidaknya ada 6 sumber data yakni (1) dokumen, (2) rekaman arsip, (3) wawancara, (4) pengamatan langsung, (5) observasi partisipan, dan (6) perangkat-perangkat fisik. Akan tetapi, dari pendapat ahli di atas penulis hanya menggunakan teknik wawancara, dokumen, pengamatan langsung, observasi partisipan. Namun, untuk menambah sumber data penulis juga menggunakan telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penulis menggunakan teknik ini karena bisa mewakili hal-hal yang akan di analisis oleh penulis

²⁵ Laode Muhamad Fathun , , 2012, *Peluang dan Tantangan E Diplomacy Dalam Menarik Investasi Asing di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Makassar, hlm.17.

sehingga dapat melahirkan teori yang cocok untuk membedah permasalahan yang ada. Seperti yang di katakan Stuart. A.Schlegel bahwa model analisis kualitatif ini akan berbentuk data → analisis data dan hipotesa dari data yang di dapatkan → teori yang digunakan.²⁶ Sehingga, model analisis data primer berupa wawancara, observasi langsung dan observasi partisipan di pilih dan memilahnya untuk melengkapi data kualitatif. Namun jika ada data kuantitatif digunakan untuk melengkapi menganalisis data kualitatif. Lebih lanjut, analisis kualitatif menurut Jack S. Levy menyerukan penelitian yang general pada semua hal mulai dari etnografis, milenia mikro historis, sampai pada penelitian yang sifatnya mikroanalisis baik yang sudah di telaah melalui metode kuantitatif ataupun kualitatif dan cenderung menggunakan prespektif *positivisme interpretative*.²⁷

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan penulis akan menggunakan teknik deduksi. Teknik ini dilakukan untuk melihat sebuah fenomena dari prinsip yang bersifat umum ke khusus. Kemudian menguji proposisi yang bersifat khusus tersebut apakah bisa di jelaskan atau diramalkan oleh teori yang dimiliki. Sehingga sifatnya lebih menguji teori. Dalam pola sebagai berikut ²⁸:

Skema 2. Strategi Deduktif Penelitian:



Metode deduktif merupakan strategi penelitian yang berangkat dari sebuah teori secara eksplisit dimana peneliti akan membuat parameter rancangan penelitian sebagai arah dan patokan untuk membuktikan teori tersebut. Mengingat teori akan di uji maka teori tersebut akan di turunkan tingkat abstraksinya, dalam bentuk model untuk membentuk hipotesa atau jawaban sementara untuk melihat hubungan kausalitas antara gabungan konsep yang ada. Kemudian konsep tersebut diturunkan abstraksinya menjadi variabel, indikator.

²⁶ Fathun Ibid.18

²⁷ Alexander Wendt, Dkk, 2014, *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional, Perdebatan-Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*, Intrans Publishing: Malang.

²⁸ Ibid:21-22.

Sehingga dari indikator tersebut bisa ditetapkan rancangan penelitian. Seperti yang telah di sajikan dalam skema di atas bahwa model deduktif ini akan meverifikasi semua sajian data yang telah di dapatkan sehingga hal ini sangat penting untuk memisahkan semua data sesuai keperluan dari peneliti. Untuk itu, semua data yang sudah didapatkan akan di kontrol secara interaktif untuk di reduksi, di verivikasi dan terakhir pada pembuatan kesimpulan atau fakta penelitian.

J. Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan latar belakang tentang kebijakan luar negeri Jokowi yang berorientasi pada kekuatan maritim sebagai instrumen ekonomi politik. Disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan, serta kerangka teoritik disertai dengan metodologi penelitian sebagai basis sistimatis melakukan riset ini.

BAB II SUMBERDAYA KEMARITIMAN INDONESIA

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan potensi-petensi maritim yang di miliki oleh Indonesia yang mewakili 4 kementerian yakni KKP yang berhubungan dengan sumberdsya kelautan dan perikanan, ESDM yang berhubungan dengan sumberdaya energi, Kemenhub yang berhubungan dengan letak posisi geopolitik Indonesia sebagai lajur perdagangan internasional serta Kemenpar yang berhubungan dengan sumberdaya laut sebagai tujuan destinasi wisata.

BAB III PERMASALAHAN GEOPOLITIK MARITIM INDONESIA

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan sejumlah permasalahan-permasalahan geopolitik keamanan maritim Indonesia yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Munculnya ancaman tersebut baik yang sifatnya tradisional seperti sengketa wilayah yang melibatkan aktor negara baik dalam skala bilateral dan regional. Kemudian dilanjutkan oleh ancaman keamanan yang sifatnya non tradisional yang melibatkan aktor selain negara baik itu pebisnis, individu, teroris yang juga mengancam stabilitas keamanan nasional. Hal ini tercermin dari terjadinya pencurian ikan, peredaran narkoba secara illegal, peredaran senjata illegal yang di suplai untuk mendukung aksi-aksi radikalisme di Indonesia, serta terorisme maritim yang mengancam navigasi internasional yang terbagi atas perompakan dan pembajakan.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA KEBIJAKAN GEOPOLITIK POROS MARITIM JOKOWI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang dikeluarkan kebijakan poros maritim terhadap keamanan geopolitik maritim Indonesia. Dikeluarkannya kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun kembali sejarah bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Kebijakan tersebut ditimbulkan oleh keinginan Jokowi untuk menjadikan laut sebagai kekuatan nasional. Kebijakan tersebut lahir dengan pertimbangan ideologis serta geopolitik Indonesia. Untuk itu kebijakan tersebut dibangun atas orientasi membangun kembali semangat budaya maritim, pengelolaan sumberdaya maritim lebih komprehensif.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi kepada *stakeholders* untuk menjadikan kajian ini sebagai salah satu preskripsi. Riset ini bisa menjadi harapan bagi sejumlah *stakeholders* untuk menelaah kebijakan orientasi pentingnya potensi laut sebagai sumberdaya nasional terkait dengan pembangunan nasional.